

MENUJU INDONESIA YANG DICITA-CITAKAN MELALUI “NATION DAN CHARACTER BUILDING”

Oleh : Brigjen Pol. Drs. Indradi Thanos



Brigjen Pol. Drs. Indradi Thanos

Cita-cita dan tujuan nasional telah dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yaitu terbentuknya Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan tujuan Nasional adalah membentuk Negara yang melindungi segenap bangsa dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pengertian dari cita-cita dan tujuan adalah suatu keadaan yang harus dicapai melalui serangkaian pendekatan, strategi dan usaha. Dengan demikian cita-cita dan tujuan nasional suatu bangsa harus dicapai dengan pendekatan, strategi dan usaha bersama dari seluruh bangsa itu sendiri yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Usaha bersama itu tentu harus berdasarkan suatu Paradigma Nasional yang menjadi pemandu bagi setiap gerak langkah bangsa ini, agar selalu berada

dalam koridor dan sistematika yang tepat, yakni : Pancasila sebagai landasan idiil, UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, Wawasan Nusantara sebagai landasan visioner dan Ketahanan Nasional sebagai landasan konsepsional.

Tonggak Bersejarah dalam perjalanan Bangsa

Masa Kebangkitan Nasional

Pendidikan formal bagi anak pribumi telah melahirkan generasi terpelajar di awal abad ke 20, dimana generasi ini menyadari bahwa kolonialisme merupakan penindasan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan dan kebangsaan. Organisasi Budi Utomo berdiri pada tanggal 2 Mei 1908, dan tanggal itu kemudian diperingati sebagai hari Kebangkitan Nasional.

Masa Sumpah Pemuda

Setelah semangat nasionalisme tumbuh maka mulai muncul kesadaran bahwa nasionalisme itu baru mempunyai arti apabila tumbuh dalam suatu wadah yang disebut Negara. Perlu satu rentang waktu untuk mensosialisasikan semangat bersatu kedalam suatu Negara, sampai akhirnya tanggal 28 Oktober 1928 para pemuda yang tergabung dalam berbagai organisasi berdasarkan kedaerahan mengadakan Kongres Pemuda yang kita kenal sekarang dengan Sumpah Pemuda, yaitu “Berbangsa Satu, Bernegara Satu, dan Berbahasa Satu.

Masa Proklamasi Kemerdekaan

Proses pematangan Sumpah Pemuda tersebut mencapai titik kulminasi dengan diproklamasikannya Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, dimana Indonesia telah menjadi Negara yang berdaulat penuh.

Kemerdekaan itu ternyata tidak mudah, karena pihak kolonial tidak mau kehilangan tanah jajahannya, hal mana ditandai dengan agresi militer yang dikenal dengan Clash Kesatu 1947 dan Clash Kedua 1948, dan termasuk taktik *divide et impera* dengan pembentukan Negara-negara bagian atau Negara boneka. Termasuk rongrongan dari dalam negeri seperti pemberontakan PKI tahun 1948 di Madiun dan Jakarta tahun 1965.

Dan pada masa ini juga mencatat kesalahan pemerintah Presiden Soekarno yang terjebak dalam megalomania kekuasaan (mengangkat diri sebagai presiden seumur hidup). Dan ini bertentangan dengan UUD 1945. Kesejahteraan rakyat terabaikan, karena inflasi membumbung mencapai 1000 persen.

Masa Bangkitnya Orde Baru

Bangkitnya Orde Baru merupakan koreksi yang mendasar terhadap penyelenggaraan Negara sebelumnya, khususnya selama demokrasi terpimpin. Pemerintah Orde Baru menerapkan pendekatan trilogi pembangunan, yaitu stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan. Ternyata stabilitas diciptakan dengan represi, dan pertumbuhan dikejar dengan sektor swasta yang penuh dengan kemudahan dan fasilitas tapi malah menimbulkan konglomerasi.

Rapuhnya fondasi ekonomi Orde Baru adalah terlalu bertumpu pada konglomerasi yang tidak jujur. Harapan akan terjadinya ‘trickle-down-effect’ untuk menimbulkan pemerataan, ternyata yang terjadi adalah ‘capital flight’ dari para konglomerat yang pada akhirnya menimbulkan beban utang Negara seperti kasus BLBI.

Pembangunan politik terabaikan, ditandai dengan deideologisasi partai-partai politik fusi menjadi hanya 3 partai. Termasuk Pemilu yang direkayasa untuk mengukuhkan kekuasaan yang ada menjadi sangat absolute. Praktek korupsi, kolusi dan nepotisme merajalela dalam kehidupan bernegara.

Salah satu kesalahan terbesar Soeharto adalah menyulap demokrasi menjadi semu (pseudo-democracy), DPR dikendalikan sepenuhnya dan menagakibatkan Eksekutif tidak mendapat imbalan yang kritis dan produktif dari Legislatif.

Krisis memuncak ketika nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing jatuh ke titik terendah, sehingga ekonomi yang disangga dengan utang menjadi ambruk. Jatuhnya nilai rupiah memicu krisis ekonomi dan merembet menjadi krisis politik. Dan akhirnya Orde Baru pun jatuh setelah berkuasa selama 32 tahun.

Masa Reformasi

Tampilnya Era Reformasi mengusung sejumlah target baru seperti; demokratisasi, penegakan supremasi hukum, dan sebagainya yang diisitilahkan sebagai 'agenda reformasi'.

Sistim politik kenegaraan diubah termasuk tata pemerintahan, termasuk partai politik yang selama Orde Baru dikebiri, dibebaskan untuk tumbuh. Hubungan pusat daerah yang semula tersentralisasi kini di desentralisasi dengan berlakunya Otonomi Daerah. Pers yang tadinya dikekang kini bebas menyuarakan berbagai kepentingan termasuk oposisi terhadap pemerintah. Demokrasi tumbuh menjadi subur, jika dalam dua periode sebelumnya hanya ada dua Prsiden, maka selama satu dasawarsa reformasi saja, Indonesai sudah punya empat Presiden, dan tiga diantaranya memerintah tidak sampai lima tahun !

Satu Abad Kebangian Nasional dan Satu Dasawarsa Reformasi Nasional :

Keluar dari Keterpurukan

Setiap pemimpin bangsa di masing-masing tahapan mempunyai kontribusi

besar bagi bangsa ini, bahwa mereka juga melakukakn kesalahan, seyogyanya hal itu dipahami sebagai kesalahan yang manusiawi, dan musti diambil sebagai pelajaran bagi bangsa di masa depan.

Kita perlu bersikap dewasa menghadapi catatan sejarah yang sudah terlanjur ditorehkan dalam perjalanan bangsa ini. Sekali lagi, itu hanyalah etape belaka dari sebuah rally panjang bangsa ini. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana etape-etape berikutnya makin medekatkan bangsa ini kepada tujuan dan cita-cita Nasionalnya.

Beberapa waktu sebelum pelaksanaan Pemilu tahun 2004 sebuah 'lembaga survey' memperkirakan bahwa partai Golkar akan memenangkan Pemilu, dan ini berdasarkan hasil survey yang menyimpulkan bahwa 'masyarakat responden' (hampir 60 %) merindukan Orde Baru. Artiya jika ada kerinduan terhadap rejim yang pernah ditumbangkan bersama oleh rakyat itu sendiri, maka itu adalah gejala politik yang tidak sederhana, karena hal itu mempertaruhkan sebuah pilihan besar dari sebuah Negara, dimana masyarakat telah sepakat untuk menggelindingkan 'reformasi total' di segala bidang. Dengan tujuan ada perbaikan substansial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Persoalannya adalah apakah rezim-rezim pengganti Orde Baru benar-benar bisa mewujudkan 'agenda reformasi' di segala bidang ?!

Ternyata pemerintahan di era reformasi masih harus berkuat untuk mencari rumusan yang paling pas untuk menyembuhkan berbagai penyakit bangsa ini. Dan sampai sekarang, harus diakui, belum ditemukan resep yang tepat !

Memang penyakit yang ditingalkan rezim Orde Baru selama tiga dasawarsa memang parah, dan untuk menyembuhkannya butuh waktu yang panjang dan memakan biaya sosial dan politik yang tidak murah. Tetapi disisi lain, masyarakat seperti tidak sabar dengan lamanya proses perbaikan / penyembuhan yang tak kunjung selesai tersebut. Secara kasat mata, memang harus diakui bahwa

beban yang dipikul rakyat sehari-hari jauh lebih berat dibanding pada masa Orde Baru.

Keterlambatan kalau tidak hendak dikatakan dengan kegagalan pemerintah memperbaiki keadaan, inilah yang memicu kerinduan kepada Orde Baru. Sebab masyarakat masih berpikir tentang hari ini, mereka belum berani memikirkan masa depan, karena persoalan hari ini saja belum sanggup diatasi.

Inilah yang harus dijawab oleh pemerintahan era-reformis, sanggup atau tidak memaknai reformasi secara riil dan langsung berkaitan dengan kepetingan dari rakyat, rakyat tidak terlalu perlu pemaknaan yang 'sophisticated' dan melangit, selama hajat hidup yang 'riil' belum teratasi dengan baik.

Demografi

Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 224.534.389 jiwa dan sekitar 58.8 % bermukim di pulau Jawa, sehingga menimbulkan ketidak merataan penduduk dan kesenjangan. Padahal jumlah penduduk dapat merupakan potensi yang besar guna mendukung pelaksanaan pembangunan Nasional. Oleh sebab itu pemerintah harus meningkatkan pemerataan pembangunan pendidikan yang sesuai dengan prinsip 'murah dan merata', agar rakyat dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan serta etos kerja yang tinggi .

Sumber Kekayaan Alam

Indonesia memiliki sumber kekayaan alam yang cukup banyak dan melimpah, namun belum dapat dikelola secara maksimal karena terbatasnya SDM dan kemampuan tehnologi.

Selain itu sumber kekayaan alam yang ada banyak yang tidak ter'setor' secara merata disetiap daerah, dan hal ini dapat memicu terjadinya kesenjangan antar daerah yang pada gilirannya dapat memicu

dis-integrasi / keinginan memisahkan dari dari NKRI.

Ideologi

Di masa Orde Baru bahwa Pancasila dijadikan alat pembenaran untuk melakukan represi terhadap warganegara yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Setiap penentangan atau bahkan koreksi sekalipun terhadap kebijakan pemerintah dapat dianggap sebagai sikap anti Pancasila, dan tidak sedikit korban yang berjatuh karena peyaringan 'bersih diri' dan 'bersih lingkungan'. Kita memang harus prihatin dengan jatuhnya berbagai korban kemanusiaan dalam usaha menegakkan ideologi Negara tersebut. Keprihatinan itu adalah satu soal, dan ideologi Negara itu sendiri adalah soal lain.

Hingga detik ini Pancasila masih jadi kesepakatan bersama sebagai ideologi Negara, oleh sebab itu kewaspadaan terhadap komunisme harus tetap ditingkatkan.

Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan bekas anggota PKI menjadi calon anggota legislatif adalah keputusan besar. Dan harus diingat bahwa ketentuan dalam pasal 60 huruf g UU 12/2003 tentang Pemilu bahwa calon anggota legislatif adalah orang yang bukan bekas anggota partai terlarang PKI atau ormas-ormasnya, dan bukan orang yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan G30S/PKI. Kita setuju dengan ketentuan tersebut, dalam rangka rekonsiliasi sosial bangsa, tapi bukan rekonsiliasi ideologis. Artinya bekas anggota PKI boleh menjadi Caleg sejauh mereka menerima ideologi Negara Indonesia yaitu Pancasila. Dan menerima ideologi Negara Indonesia berarti tidak lagi menganut komunisme.

Politik

Berkaitan dengan politisi dan partai politik, harus ditekankan bahwa kesetiaan kepada partai telah berakhir ketika kesetiaan kepada Negara dimulai. Para

politisi seharusnya menjadikan kaidah itu sebagai landasan kegiatan politiknya, karena kesetiaan pada partai adalah bagian dari kesetiaan pada Negara. Seorang politisi setia pada partainya sejauh partainya setia pada perjuangan kepentingan Negara.

Kesadaran seperti itu masih berupa cita-cita belaka, para politisi masih jauh dari kesadaran untuk berpikir tentang kepentingan bangsa. Bahkan kepentingan partainya sendiri kerap terabaikan, mereka lebih memusatkan perhatian pada kepentingan pribadi. Jika demikian, tidakkah kehadiran partai politik dengan visi dan kepemimpinan seperti itu justru menjadi perusak Bangsa ?

Partai politik jika benar klaim mereka sebagai agent of development, harus mendidik masyarakat dengan membangun dukungan dengan basis ketertarikan rasional, bukan ketertarikan emosional. Disinilah integritas para pemimpin politik diuji, mereka seyogyanya tak hanya memikirkan rasa, tetapi juga mengasah logika bangsanya.

Ekonomi

Krisis ekonomi yang diawali krisis moneter pada awal Juli 1997 terus berlanjut hingga terjadi krisis multi-dimensional (segala aspek kehidupan). Tidak seperti Negara Asia lainnya, yang sudah lebih dulu dapat keluar dari dari krisis dan berhasil melakukan pemulihan. Persoalan utama adalah fundamental ekonomi kita sangat rapuh, karena paradigma pembangunan yang masih berakar selama Orde Baru yang menekankan pertumbuhan ekonomi, stabilitas semu, dan struktur komando yang didominasi pemerintah.

Pemerintahan

Terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono -Kalla adalah keputusan kolektif rakyat untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Artinya, dipundak pasangan pemimpin ini terpancang harapan rakyat bagi kehidupan yang lebih baik. Melihat kondisi saat ini yang belum pulih dari keterpurukan di segala bidang, Presiden hasil Pemilu mendatang harus membentuk kabinet ahli (zaken cabinet).

Artinya kabinet yang diisi oleh menteri-menteri yang ahli dibidangnya, yang cakap dan capable. Dan untuk membentuk kabinet ahli semacam ini perlu suasana politik yang ideal dengan dukungan penuh dari rakyat dan Parlemen.

Mengenai otonomi daerah, sebetulnya bertujuan baik, tetapi pelaksanaan Otonomi Daerah selama tiga tahun belakangan ini, menimbulkan persoalan baru dalam hubungan Pusat-Daerah atau di dalam daerah itu sendiri, yang berdampak pada hubungan masing-masing daerah itu sendiri, serta hubungan antara daerah dengan masyarakat. Otonomi Daerah, terlepas dari berbagai dampak positifnya, ternyata juga telah melahirkan raja-raja pongah di daerahnya. Disinilah tugas Pemerintah Pusat dan lembaga perwakilan rakyat untuk menata kembali pola hubungan yang harmonis antara Daerah dengan Pusat dengan tujuan demi kepentingan rakyat itu sendiri.

Sosial budaya

Dalam aspek kebudayaan yang paling mendasar adalah kesadaran tentang, baik identitas diri atau bangsa, yang menjadi persoalan adalah identitas keIndonesiaan itu belum terbentuk dengan kuat. Menurut sejarah, ke-Indonesiaan itu memang baru disemai sejak tahun 1928 ketika pertama kali dikumandangkan 'sumpah pemuda'. Artinya kurun waktu 80 tahun mungkin masih terlalu muda untuk membentuk identitas kebangsaan. Apalagi jika dibandingkan dengan Negara di Amerika, Eropa yang telah ratusan tahun. Atau dengan Negara Asia yang sudah ribuan tahun. Namun persoalannya adalah bukan 'waktu', tetapi bagaimana memunculkan identitas kebangsaan, sejak dini tak pernah berhenti sampai kapanpun dalam setiap gerak langkah kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat dari setiap individu anggota masyarakat, artinya ada proses yang terus menerus.

Sikap yang lebih mengutamakan nilai-nilai asing ketimbang nilai-nilai lokal (walaupun banyak nilai lokal yang mengandung substansi yang sama) adalah cerminan sikap rendah diri. Inilah yang

menyebabkan bangsa Indonesia belum mempunyai identitas budaya nasional yang kuat sehingga belum merasa bangga sebagai bangsa. Sikap paternalistik disatu sisi dapat mejadi positif, tapi disisi lain juga dapat berarti negatif. Artinya sikap paternalistik bangsa Indonesia juga menimbulkan sikap yang tidak inovatif, tidak kreatif, kurang kritis, dan cenderung pasif. Sisi negatif dalam sikap budaya Indonesia ini harus segera diperbaiki, sebab perkembangan arus globalisasi telah menciptakan suatu kondisi yang sangat kompetitif, untuk bisa bersaing, bangsa Indonesia harus memiliki semangat tempur yang tinggi, daya tahan yang kuat, kreatif, aktif, inovatif, dan cermat membaca setiap peluang yang ada. Globalisasi menguakkan peluang yang besar bagi bangsa yang siap bersaing, tapi juga membuka jurang yang dalam untuk menguburkan bangsa yang tidak kompetitif.

Hankam

Potensi terbesar dalam ancaman pertahanan Negara ialah konflik di wilayah perairan yang dipicu oleh adanya kompetisi terhadap kekayaan yang terkandung di dalam wilayah maritim. Berlaku hukum laut tentang Archipelagic Principle telah memperluas wilayah perairan masing-masing Negara kepulauan, dan akhirnya memicu persengketaan perbatasan antara negara-negara tetangga.

Pengakuan wilayah kedaulatan secara formal tidak menjamin perlindungan hukum internasional atas wilayah maritim. Misalnya hukum internasional tidak memberi toleransi pada intervensi atau penetrasi militer asing terhadap suatu Negara, tetapi pelanggaran wilayah maritim oleh kapal-kapal asing atau pencurian ikan yang dilakukan nelayan asing tidak mendapat perlindungan dari PBB.

Indonesia berhak atas Wawasan Nusantara, tetapi pengamanan dan pertahanan wilayah dan pemanfaatan aset yang dikandungnya, sepenuhnya berpulang kepada kemampuan Indonesia sendiri.

Akibat Era Reformasi, Indonesia mengalami persoalan instabilitas yang

berupa perbedaan pendapat yang bukan diselesaikan dengan demokratis tapi secara anarkis, dan termasuk ancaman terorisme yang membuat sejumlah Negara mengeluarkan travel warning bagi warganya, yang akhirnya menurunkan pendapatan devisa turisme.

Hal yang mendesak sat ini adalah membenahi system pertahanan dan keamanan, dimana sistem pertahanan dan keamanan nasional harus nyambung dengan konteks keamanan regional dan internasional.

“Satu-satunya milik Negara yang tidak berubah adalah TNI. Politik TNI adalah politik Negara”, demikian diucapkan panglima besar Jenderal Soedirman, dan hal itu masih akan terus terasa relevansinya selama Negara ini masih ada. Modernisasi Alutsista menjadi hal yang perlu, karena ada dua hal yaitu : mengurangi ketergantungan akan Negara lain dengan memaksimalkan industri dalam negeri dan modernisasi yang bertolak pada kondisi geografis Negara sebagai Negara kepulauan, artinya dengan lebih memperkuat armada TNI-AL.

Hukum

Kondisi penegakan supremasi hukum di Indonesia masih jauh dari yang seharusnya, disebabkan oleh lemahnya substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Berbagai persoalan dalam negeri bersumber dari krisis multi-dimensional telah menurunkan kemampuan Bangsa Indonesia untuk mengambil manfaat dari peluang yang terbuka itu serta menjawab tantangan yang dihadapi.

Penegakan supremasi hukum membutuhkan kondisi yang ideal yang mensyaratkan adanya peraturan perundangan yang bermutu dan memenuhi prinsip-prinsip dasar pembentukan sebuah Undang-Undang. Kesiapan aparat hukum yang profesional, menguasai teknis yuridis, punya komitmen kuat pada keadilan, integritas tinggi, bermoral baik, berani berpihak pada kebenaran, dan memiliki tingkat disiplin, menjadi prasarat

berikutnya. Termasuk perwujudan budaya hukum yang tinggi, yang mana akan membentuk perilaku masyarakat menjadi taat hukum, malu dan merasa bersalah jika melakukan pelanggaran hukum.

Dalam jangka pendek pemerintah melalui lembaga ad-hoc perlu melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundangan yang tidak memenuhi prinsip-prinsip pembuatan undang-undang seperti dalam UU NO.10/2004, untuk dilakukan penyempurnaan baik melalui mekanisme amandemen, maupun membentuk perundangan baru menggantikan yang lama.

Lembaga penegak hukum harus patuh dan taat sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya, sehingga tidak terjadi “perang saudara” yang justru akan melemahkan wibawa lembaga tersebut. Lembaga-lembaga hukum harus lebih bersinergi secara positif agar bisa bahu-membahu menegakkan supremasi hukum.

Nation and Character building : kata kunci Kebangkitan Nasional kedua

Sejarah Indonesia ditandai dengan siklus-siklus perubahan dan yang selalu dipelopori oleh generasi muda yang terdidik yang mempunyai kesadaran dan tanggung jawab terhadap Bangsa dan Negara. Dengan demikian mengapa para ‘founding fathers’ mempunyai kesadaran yang jauh kedepan dengan menjadikan “mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagai salah satu tujuan Nasional yang dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945. Tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa tidak saja bagian substansial dari peningkatan harkat dan martabat kemanusiaan bagi bangsa merdeka, tetapi juga untuk menjamin agar Negara mempunyai ‘persediaan’ sumber daya manusia terdidik untuk mengisi dan mengawal pencapaian tujuan-tujuan dan cita-cita Nasional.



Untuk itu pemerintah sudah saatnya melakukan koreksi menyeluruh terhadap kebijakan pendidikan, apakah kebijakan pendidikan yang ada sudah mampu menghasilkan anak-anak muda yang terdidik dan kritis ?.

Banyak anak-anak hebat dan jenius di Negara ini, tetapi kemana mereka sekarang?. Pada beberapa waktu yang lalu tersiar kabar ada anak peraih medali emas kini bersekolah dan terikat perjanjian kerja dengan luar negeri. Kenapa ?. Alasannya sangat memilukan, karena pemerintah telah ingkar janji untuk memberikan beasiswa melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan saat ini ratusan orang Indonesia yang sangat *educated* memilih tinggal dan menyumbangkan pengetahuannya di luar negeri. Bukan karena tidak nasionalis, tapi karena Negara ini tidak memberikan penghargaan dan kesempatan yang layak bagi mereka. Ini, sekali lagi adalah akibat konsep pendidikan yang tidak jelas, karena pendidikan adalah tidak hanya menjadikan orang terdidik, tapi juga bagaimana memberikan kondisi, perlakuan dan penghargaan yang layak bagi orang-orang berprestasi seperti itu.

Pendidikan yang baik memang mahal dan masyarakat juga setuju, tapi yang ditentang keras adalah komersialisasi pendidikan ! Dan hal ini tercermin dari telah terjadinya 'perdagangan' pendidikan, mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Melangitnya biaya pendidikan saat ini menjadi elitis dan tidak terjangkau oleh mayoritas rakyat yang saat ini sedang didera oleh semakin mahalnya biaya kebutuhan hidup. Jika pendidikan mahal telah menjadi barang mewah, bagaimana kita akan bicara peningkatan kualitas sumber daya manusia, bagaimana kita mau bicara menciptakan generasi muda terdidik dan kritis untuk menjadi penyelamat Bangsa dan Negara ini di masa depan?. Mahalnya pendidikan akan membawa bangsa ini pada kenyataan pahit : "akan lahir suatu generasi yang hanya berpendidikan pas-pasan", dan ini jumlahnya sangat signifikan dibandingkan dengan sekelompok masyarakat yang mampu membeli pendidikan mahal!.

Satu dasawarsa Reformasi Nasional, menunjukkan kolonialisme klasik sudah tidak lagi dikenal, tetapi justru kita sedang berada di ambang neocolonialism !. Untuk itu , *momentum ini harus kita sambut dengan semangat Nasionalisme untuk membangun kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan.*

Hanya dengan pendidikan, bangsa kita bisa memberi makna bagi "kebangkitan nasional kedua". Kemampuan kita membangun pendidikan saat ini, menentukan apakah dimasa depan kedaulatan Negara ini masih bisa kita pertahankan !.

Karena pendidikan adalah upaya mencerdaskan bangsa yang menjadi salah satu tujuan pokok dari kemerdekaan negeri ini, maka memberikan pendidikan yang berkualitas adalah tanggungjawab Negara.

Pendidikan yang kita kembangkan adalah dalam rangka nation and character building, sehingga output pendidikan itu adalah anak-anak bangsa yang mempunyai rasa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Pendidikan tidak hanya mengolah cipta dan karsa semata, tetapi juga memupuk rasa. Oleh sebab itu, proses pendidikan harus disertai dengan penanaman nilai-nilai ideologi dan wawasan kebangsaan.

Salah satu jalan keluar yang patut dipikirkan adalah membangun lembaga pendidikan dengan metode pendidikan seperti disekolah menengah atas "Taruna Nusantara" di Magelang, karena pendidikan disini menggabungkan secara serasi antara intelektualitas, wawasan kebangsaan dan kesamaptaaan. Dan seyogyanya dapatlah dibangun sekolah semacam ini di setiap provinsi, untuk menampung anak-anak cerdas dan berbakat dari berbagai daerah, tidak hanya untuk pendidikan tingkat menengah tapi juga sampai pendidikan tingginya.***

disarikan oleh moch.rizal pahlevi.na

Pemuda adalah pelaku dan bagian dari perubahan dalam masyarakat, oleh karena itu bangsa ini perlu membangun generasi muda yang kritis, sehingga perubahan tidak pernah berhenti . Dan jika generasi muda sudah masuk pada establishment maka siklus akan terulang kembali, akan masuk generasi muda yang kritis berikutnya. Oleh karena itu generasi tua yang berkuasa perlu memberi ruang pada kritisisme itu.

Jasa terbesar kaum muda adalah mendobrak perilaku lancung kemapanan lama, tapi dosa terbesar mereka adalah bukan ketika melakukan kelancungan ketika menjadi kemapanan baru, tetapi ketika tidak memberikan ruang bagi tumbuhnya kritisisme generasi dari zaman baru. Adalah merupakan suatu pembunuhan bagi masa depan Bangsa, apabila kemapanan kekuasaan tidak memberi ruang atau malah memberangus kritisisme generasi muda.

Kekuasaan, sebersih apapun, memang sukar menghindarkan diri dari adagium 'power tends to corrupt'. Pencapaian good governance merupakan suatu usaha panjang yang senantiasa berproses, dan karenanya tidak mungkin tercapai seratus persen. Karena tidak ada Negara manapun di dunia ini yang mampu membebaskan diri dari 'abuse power', dan satu-satunya yang bisa dilakukan dalam batas-batas yang manusiawi adalah memperkecil penyimpangan yang mungkin terjadi.

Maka setiap era pemerintahan harus memprioritaskan usaha membangun keadaan yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya generasi muda yang terdidik dan kritis, dengan cara memajukan pendidikan bagi seluruh rakyat. Pengalaman diberbagai negara menunjukkan bahwa kemajuan luar biasa yang mereka capai, diawali dengan membangun pendidikan bagi masyarakatnya, seperti yang telah dialami Negara Jepang, Cina, bahkan Negara tetangga kita Singapura, Malaysia.